



# DINAMIKA GOVERNANCE

## JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

<http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/index>

### PEMBERDAYAAN INKLUSIF BERBASIS KOMUNITAS: DINAMIKA KONTEKS IMPLEMENTASI PROGRAM SEKOLAH PEREMPUAN SRIKANDI DI KOTA DENPASAR

I Gusti Ayu Ngurah Valencia Novitasari<sup>1</sup>, Nyoman Sumawidayani<sup>1</sup>, I Putu Adi Permana Putra<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Warmadewa, Indonesia

\*Email Corresponding: [permanaputra@warmadewa.ac.id](mailto:permanaputra@warmadewa.ac.id)

#### ARTICLE INFORMATION      ABSTRACT

##### Article history:

Received date: 12 Maret 2026

Revised date: 28 April 2026

Accepted date: 15 Juni 2026

##### DOI:

<https://doi.org/10.33005/jdg.v16i1.5708>

*The Srikandi Women's School Program serves as an affirmative policy intervention addressing gender inequality among vulnerable village women previously marginalized by hierarchical institutions, patriarchal culture, apathy, and domestic vulnerability. This study analyzes the program's implementation dynamics utilizing Grindle's (1980) model. A descriptive qualitative approach was utilized for this research, primary data were gathered through observations, in-depth interviews, and document analysis from village officials, Bali Sruti Foundation facilitators, and participants. Analysis of the policy content reveals an asymmetry of empowerment. While the program effectively distributes non-material benefits such as critical awareness, self-confidence, and social agency its impact remains micro-scale, with strategic decision-making still mediated by village bureaucratic elites. Regarding the implementation context, progressive political will is evident through the program's institutionalization in the Village Budget (APBDes). Mentoring strategies successfully fostered participant responsiveness. However, activities remain largely socio-educational, failing to address power-sharing or transform patriarchal domestic relations. In conclusion, the program is an effective incubator for female agency, breaking women's apathy. Nevertheless, achieving sustainable gender equality necessitates strengthening economic access and ensuring the equitable distribution of political authority.*

**Keywords:** Policy Implementation; Women's Empowerment; Grindle's Model; Srikandi Women's School; Gender Equality

#### ABSTRAKSI

Program Sekolah Perempuan Srikandi hadir sebagai intervensi kebijakan afirmatif dalam menghadapi ketimpangan gender. Kelompok perempuan rentan di Desa sebelumnya dihadapkan pada struktur kelembagaan desa yang hierarkis, kuatnya budaya patriarki yang memicu sikap apatis, rendahnya partisipasi publik, serta kerentanan terhadap permasalahan domestik. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika implementasi program tersebut menggunakan model implementasi kebijakan Merilee S. Grindle (1980). Riset ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Data primer digali secara komprehensif dari aparat desa, fasilitator Yayasan Bali Sruti, serta partisipan program. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data pada dimensi isi kebijakan temuan menyingkapi adanya asimetri pemberdayaan; program secara masif telah mendistribusikan manfaat non-material berupa kesadaran kritis, peningkatan kepercayaan diri, dan keagenan sosial, namun masih berskala mikro. Pengambilan keputusan strategis masih bersifat termediasi oleh elite birokrasi desa. Pada dimensi lingkungan implementasi, ekologi politik desa menunjukkan adanya *political will* progresif melalui pelebagaan program dalam APBDes. Strategi pendampingan juga membentuk kepatuhan dan daya tanggap partisipan yang konsisten. Kegiatan ini masih sebatas kegiatan sosial-edukatif, belum menyentuh pembagian kekuasaan (*power-sharing*) dan relasi domestik patriarki. Dapat dipahami dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Program Sekolah Perempuan menjadi inkubator keagenan yang efektif, namun membutuhkan penguatan akses ekonomi dan pemerataan kewenangan politik agar kesetaraan gender dapat terwujud secara berkelanjutan.

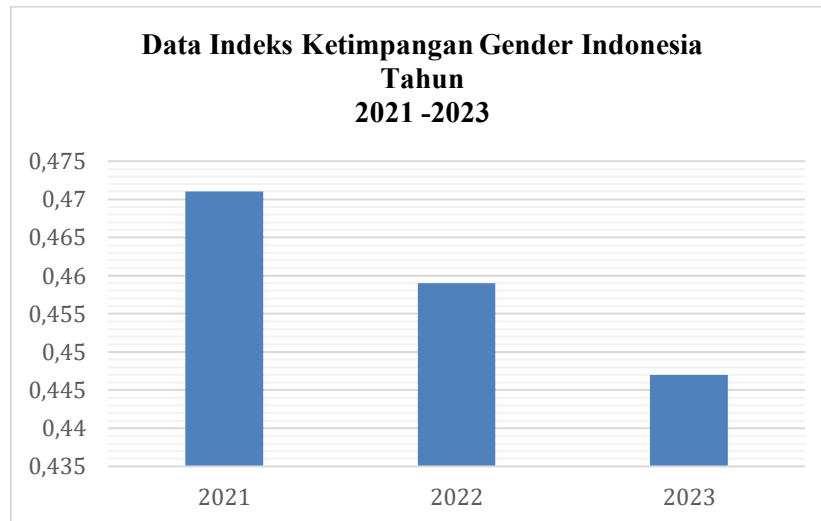
**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan; Pemberdayaan Perempuan; Model Grindle; Sekolah Perempuan Srikandi; Kesetaraan Gender



This article is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International Licence](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

## PENDAHULUAN

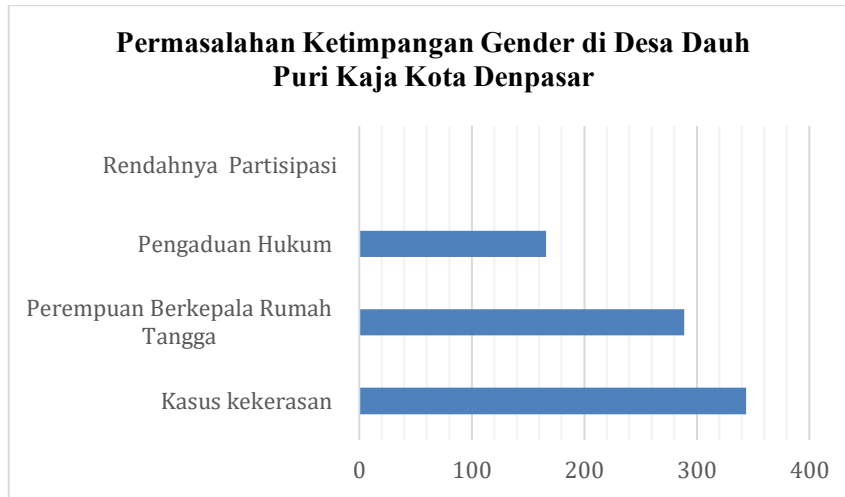
Ketimpangan gender menjadi isu sosial yang persisten dan multidimensional, membentang dari konteks makro-struktural pembangunan hingga ke dinamika keseharian di tingkat komunitas lokal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024 mengonfirmasi hal ini dengan mencatatkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Indonesia di angka 0,446 pada tahun 2023 (Badan Pusat Statistik, 2024). Meskipun grafik tersebut mengindikasikan adanya tren pelandaian, nilai yang ada masih merepresentasikan jurang kesenjangan yang esensial pada aspek kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan ekonomi perempuan. Uraian data dapat di lihat pada grafik berikut.



Sumber: Badan Pusat Statstika 2024

Data di atas menterjemahkan bahwa konsekuensi dari ketimpangan ini menjelma menjadi hambatan sistemik bagi pembangunan berkelanjutan, salah satunya bermuara pada kerentanan fisik dan psikologis perempuan. Merujuk data (Komnas Perempuan, 2024) dan (Simfoni - PPA, 2025) angka kekerasan terhadap perempuan telah mencapai 445.502 kasus, dengan 330.097 kasus spesifik berbasis gender mengalami eskalasi sebesar 10,76% secara tahunan. Kerentanan ini berkelindan dengan marginalisasi ekonomi, di mana literasi keuangan perempuan Indonesia masih stagnan di angka 40%, terpaut 8 poin lebih rendah dari laki-laki (Chen & Volpe, 2002) dan (Gudjonsson et al., 2022). Subordinasi ini terlegitimasi dalam ranah politik lokal; partisipasi perempuan di ruang pengambilan keputusan seperti musyawarah desa (Musdes) dan posisi kepemimpinan formal masih tereduksi oleh belenggu norma patriarki.

Kondisi ketimpangan gender yang terjadi di tingkat nasional tidak berdiri sendiri, melainkan turut terefleksikan hingga pada level komunitas lokal. Realitas ini tampak jelas dalam kehidupan sosial masyarakat di Desa Dauh Puri Kaja, Kota Denpasar, di mana perempuan masih menghadapi berbagai bentuk ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya, partisipasi dalam ruang publik, serta kontrol atas pengambilan keputusan di tingkat keluarga maupun desa. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara awal dengan perangkat desa serta koordinator Program Sekolah Perempuan Srikandi, ditemukan bahwa ketimpangan gender di Desa Dauh Puri Kaja tidak hanya bersifat individual, tetapi telah membentuk pola struktural yang mengakar dalam praktik sosial sehari-hari. Ketimpangan tersebut kemudian dapat dipetakan ke dalam empat dimensi utama, yaitu dimensi kekerasan berbasis gender, dimensi ekonomi dan literasi keuangan perempuan, dimensi akses informasi dan literasi hukum, serta dimensi partisipasi perempuan dalam ruang pengambilan keputusan. Keempat dimensi ini saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain, sehingga membentuk lingkaran ketidakadilan yang memosisikan perempuan dalam kondisi yang lebih rentan secara sosial, ekonomi, maupun politik, sebagaimana ditunjukkan pada grafik di bawah.



Sumber: Data Arsip Desa Dauh Puri Kaja

Grafik di atas mengilustrasikan ketimpangan gender di Desa Dauh Puri Kaja tidak berdiri sebagai entitas tunggal, melainkan terwujud dalam empat bentuk persoalan yang saling terhubung dan memperkuat kerentanan struktural. Manifestasi tersebut meliputi tingginya prevalensi kekerasan berbasis gender, hambatan sistemik dalam akses kemandirian ekonomi, rendahnya literasi hukum dan informasi, serta partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di tingkat desa. Realitas empiris ini mengonfirmasi bahwa marginalisasi perempuan digerakkan oleh faktor multidimensional yang saling mengunci. Sehingga, perempuan terus terdorong ke dalam lingkaran subordinasi secara sosial, ekonomi, dan konstelasi politik lokal. Fenomena masa lalu juga menggambarkan bahwa kaum perempuan tidak memiliki ruang dan waktu untuk berperan sebagaimana kaum laki-laki. Hal itu dapat membatasi kemerdekaan bagi kaum perempuan dan sebagai konsekuensinya terjadi ketimpangan gender (Putra 2023).

Merespons akar persoalan ketimpangan gender yang multidimensional, kolaborasi lintas sektor antara Pemerintah Desa Dauh Puri Kaja, Yayasan Bali Sruti, dan DP3AP2KB Kota Denpasar melahirkan Program Sekolah Perempuan Srikandi pada April 2023. Inisiatif ini dikonstruksi sebagai ruang pembelajaran inklusif bagi kelompok perempuan ter subordinasi. Melalui pendekatan yang holistik, program ini mensinergikan pilar pendidikan kritis, literasi hukum, dan pemberdayaan ekonomi. Rasionalitas di balik program ini melampaui sekadar memberikan edukasi semata, melainkan ditujukan sebagai katalisator untuk membangkitkan kesadaran kritis, merajut kohesi sosial, serta mendobrak hambatan partisipasi perempuan dalam siklus pembangunan desa. Hal ini menekankan bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi wacana penting dalam mencapai keadilan dan kesetaraan gender (Putra, 2025). Keabsahan implementasi program ini bersandar pada instrumen hukum yang telah ada. Regulasi nasional seperti Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) menjadi fondasi utamanya. Kontekstualisasi kebijakan di tingkat daerah kemudian diperkuat melalui Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak Tahun 20 (DRPPA). Kerangka regulasi ini memberikan landasan bagi desa maupun kelurahan untuk mengintegrasikan perspektif keadilan gender, menjamin ruang aman bagi perempuan, serta memperluas kapasitas deliberative dalam tata kelola pemerintahan lokal.

Kajian mengenai inisiatif pemberdayaan Perempuan yang berorientasi komunitas telah mengalami perluasan dalam berbagai penelitian dengan pendekatan dan fokus analisis yang berbeda. (Iqbal Hibatulloh & Nur Haryani, 2023) mengevaluasi Program Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri di Kabupaten Sleman dengan menggunakan kerangka pemberdayaan yang dikembangkan oleh Sara Longwe (1991) dan menemukan bahwa tingkat pemberdayaan kaum perempuan baru mencapai tahap kesejahteraan (*welfare*) dan akses (*access*), sedangkan elemen kesadaran kritis (*conscientization*) dan partisipasi (*participation*) masih belum maksimal. Di sisi lain, (Ramadhani & Yuliani, 2022) dalam penelitian tentang Program Keluarga Harapan di Kabupaten Klaten menyimpulkan bahwa adanya budaya patriarki menjadi penghalang

yang konsisten bagi perempuan untuk meraih tingkat kontrol (*control*) dalam pengambilan keputusan strategis. Kedua studi tersebut mengindikasikan bahwa Model Longwe cukup efektif untuk mengevaluasi pencapaian tingkat pemberdayaan perempuan, namun belum melakukan analisis mendalam mengenai bagaimana proses penerapan kebijakan berdampak pada keberhasilan atau keterbatasan pencapaian pemberdayaan ini. Penelitian tentang program Sekolah Perempuan sebagai model pemberdayaan yang bersumber dari komunitas juga memunculkan temuan yang penting, meskipun masih terdapat batasan dalam analisis yang dilakukan. Hasil penelitian yang dilakukan Kurniawan & Ana Melati (2022) yang meneliti Sekolah Perempuan di Kabupaten Gresik menemukan bahwa program ini berhasil meningkatkan pemahaman perempuan mengenai kesetaraan gender dan memotivasi keberanian perempuan untuk menyampaikan pendapat di tempat umum. Namun, penelitian ini menggunakan pemahaman pemberdayaan secara luas tanpa dukungan kerangka teoritis yang terperinci. Penelitian lain oleh Septianingrum et al (2024) tentang Sekolah Perempuan Karangturi di Kabupaten Karanganyar lebih berfokus pada peningkatan kualitas perempuan dan penguatan ekonomi keluarga. Sementara itu, (Adnawi & Darmawan, 2024) yang meneliti Program Sekoper Cinta di Kota Bekasi menerapkan pendekatan pendidikan berbasis komunitas dengan penekanan pada peningkatan kapasitas perempuan melalui kegiatan pendidikan non-formal. Walaupun ketiga penelitian ini menunjukkan bahwa Sekolah Perempuan dapat meningkatkan kapasitas dan partisipasi perempuan, studi-studie tersebut belum menggabungkan Model Implementasi Kebijakan Grindle (1980) dan Model Pemberdayaan Longwe (1991) secara bersamaan sebagai kerangka analisis yang sistematis. Di samping itu, penelitian mengenai peran pendidikan nonformal dalam pemberdayaan perempuan oleh (Latifa Rahmasari et al., 2023) di Desa Kanyoran, Kediri, juga mengungkap bahwa pendidikan nonformal dapat meningkatkan kemampuan pengetahuan, keterampilan, serta partisipasi perempuan dalam kegiatan sosial di masyarakat. Namun, penelitian ini lebih menekankan pada efektivitas pendidikan nonformal tanpa menghubungkannya dengan analisis implementasi kebijakan berdasarkan teori.

Dari perspektif implementasi kebijakan, (Mubarok et al., 2020) membandingkan Model Grindle (1980) dengan model implementasi lainnya dan menegaskan keunggulan komparatif Model Grindle dalam membaca implementasi sebagai proses politik-administratif yang dipengaruhi oleh kepentingan dan distribusi kekuasaan aktor; namun studi ini tidak mengintegrasikannya dengan penilaian capaian pemberdayaan perempuan secara berjenjang. Dari sudut pandang teoretis pemberdayaan, (Kabeer, 1999) menegaskan bahwa pemberdayaan substantif mensyaratkan tidak hanya akses terhadap sumber daya, tetapi juga transformasi pada dimensi *agency* yang memungkinkan perempuan membuat pilihan strategis atas hidupnya, sementara (Githaiga & Wildermuth, 2022) mengonfirmasi relevansi Kerangka Longwe dalam menganalisis pemberdayaan secara bertingkat dari pemenuhan kebutuhan dasar hingga kontrol sumber daya. Dari konteks empiris Bali, (Made Alit Septiari & Gusti Ayu Widya Dhammayanti, 2023) mengungkapkan bahwa perempuan Bali menghadapi pembatasan ruang gerak ganda dalam ranah domestik maupun adat, di mana dominasi sistem *banjar* dan struktur adat yang bersifat patriarkal menjadikan intervensi pemberdayaan memiliki kompleksitas tersendiri sebuah dimensi kontekstual yang belum pernah dikaji secara mendalam dalam studi implementasi program pemberdayaan perempuan mana pun. Penelitian terdahulu masih menyisakan beberapa celah kajian.

Berdasarkan sejumlah riset sebelumnya, dapat dipahami bahwa studi tentang penguatan perempuan melalui program berbasis masyarakat telah banyak dilakukan. Secara empiris, belum banyak studi yang mengkaji program Sekolah Perempuan sebagai model pemberdayaan perempuan berbasis komunitas desa dalam konteks budaya patriarki Bali yang dipengaruhi oleh sistem adat dan banjar. Secara teoretis model Grindle mampu menganalisis dinamika implementasi. Berdasarkan celah ilmiah dan kebaruan yang telah diidentifikasi, penelitian ini tefokus untuk meninjau dinamika pelaksanaan Program Sekolah Perempuan Srikandi di Kota Denpasar. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Program Sekolah Perempuan Srikandi melalui dimensi *content of policy* dan *context of implementation*. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait bagaimana

proses pelaksanaan program berpengaruh terhadap pencapaian pemberdayaan perempuan di tingkat komunitas.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada urgensi penelitian untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan holistik mengenai implementasi Program Sekolah Perempuan Srikandi di Desa Dauh Puri Kaja, khususnya terkait strategi mereduksi ketimpangan gender melalui pemberdayaan. Menurut Creswell (dalam Sugiyono, 2023), metode kualitatif berfokus pada eksplorasi dan pemahaman makna yang diatribusikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu fenomena sosial. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menangkap kompleksitas pelaksanaan program secara komprehensif, sekaligus mengidentifikasi faktor determinan yang menjadi pendorong maupun konstrain (hambatan) di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui: observasi non-partisipan guna mengamati dinamika pelaksanaan program secara langsung tanpa adanya intervensi dari peneliti; wawancara semi-terstruktur dengan informan yang ditentukan melalui teknik *purposive sampling*; serta studi dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini mengadopsi tahapan analisis kualitatif Creswell (dalam Sugiyono, 2023), yang meliputi enam langkah sistematis: (1) pengorganisasian dan persiapan data; (2) pembacaan awal dan pembuatan memo; (3) pendeskripsian dan pengklasifikasian data menjadi kode dan tema; (4) pengembangan interpretasi; (5) visualisasi dan representasi data; serta (6) pemaknaan akhir tema.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian dan pembahasan pada bagian ini difokuskan untuk mengurai kompleksitas dan capaian implementasi Program Sekolah Perempuan Srikandi sebagai instrumen mitigasi ketimpangan gender di Desa Dauh Puri Kaja. Berdasarkan temuan lapangan, upaya pemberdayaan perempuan melalui program ini tidak sekadar berjalan pada tataran administratif, melainkan telah menyentuh dimensi kultural dan struktural masyarakat setempat.

## **SUBSTANSI ATAU ISI KEBIJAKAN (*CONTENT OF POLICY*)**

Mengacu pada paradigma implementasi kebijakan yang digagas oleh Merilee S. Grindle (1980), efektivitas sebuah intervensi sosial tidak hanya bergantung pada lingkungan operasionalnya, tetapi sangat ditentukan oleh substansi atau isi kebijakan (*content of policy*) itu sendiri. Grindle menegaskan bahwa *content of policy* menjadi poin yang sangat penting dalam meninjau sebuah program dirancang, siapa yang direpresentasikan, hingga sejauh mana sumber daya dialokasikan secara riil. Dalam kerangka ini, kebijakan tidak diposisikan sekadar sebagai dokumen administratif, melainkan sebagai instrumen afirmatif yang berkaitan dengan kepentingan (*interests*), distribusi manfaat (*benefits*), dan proyeksi transformasi (*extent of change*) yang hendak dicapai. Oleh karena itu, membedah *content of policy* menjadi esensial untuk mengukur rasionalitas dari Program Sekolah Perempuan Srikandi sebelum mengevaluasi dampaknya dalam mendekonstruksi ketimpangan gender di tingkat desa.

### **1) Kepentingan Kelompok Sasaran (*Interests Affected*)**

Identifikasi kepentingan kelompok sasaran merupakan aspek fundamental dalam kerangka implementasi. Keberhasilan sebuah kebijakan sangat ditentukan oleh sejauh mana program tersebut relevan dengan urgensi permasalahan riil yang dihadapi oleh aktor-aktor yang menjadi subjeknya. Dalam konteks ini, Program Sekolah Perempuan Srikandi dirancang secara inklusif untuk mengintervensi entitas perempuan yang selama ini berada pada posisi terpinggirkan dari akses layanan publik. Berdasarkan temuan lapangan, program ini secara presisi telah mengakomodasi kebutuhan kelompok dengan tingkat kerentanan berlapis, seperti perempuan kepala keluarga, penyintas kekerasan, penyandang disabilitas, serta individu yang secara historis terisolasi dari dinamika desa. Kehadiran program ini sekaligus berfungsi sebagai katalisator bagi pemerintah desa dalam memetakan dan merangkul demografi rentan yang sebelumnya tidak terdata dan tidak memiliki keberanian untuk menyuarakan permasalahannya di ruang publik.

Temuan lapangan mengungkap bahwa sebelum adanya intervensi, mayoritas perempuan sasaran terbelenggu dalam budaya diam. Kepasifan partisipasi ini bukanlah sebuah kebetulan, tetapi bentuk dikonstruksi oleh kombinasi rasa takut, stigma sosial, dan internalisasi norma patriarki yang menganggap bahwa persoalan domestik adalah aib pribadi yang tabu untuk diutarakan. Program Sekolah Perempuan Srikandi tidak mereduksi perannya sebatas pada transfer pengetahuan atau edukasi kognitif semata. Akan

tetapi, program ini bertransformasi menjadi ruang aman yang memfasilitasi katarsis sosial. Ruang ini secara perlahan membongkar perasaan malu dan ketidakberdayaan yang selama ini dialami peserta akibat status sosial sebagai ibu rumah tangga menjadi rasa saling memiliki. Penemuan atas kesamaan nasib di antara peserta memicu lahirnya solidaritas komunal yang efektif menghapus perasaan terisolasi.

Mengacu pada dimensi isi kebijakan (*content of policy*) dalam model Grindle, akomodasi kepentingan dalam Program Sekolah Perempuan telah menjawab kebutuhan nyata partisipannya dalam upaya mereduksi ketimpangan relasi kuasa. Pergeseran sikap dari apatis menjadi individu yang berani berbagi pengalaman menandakan keberhasilan awal dari transisi menuju kesadaran kritis. Namun, agar arah perubahan sosial yang bertahap ini tidak hanya berhenti pada euforia komunal sesaat, kesinambungan pemberdayaan ini mutlak membutuhkan afirmasi strategis. Pelembagaan kebijakan formal desa yang lebih mengikat di masa depan sangat esensial untuk memastikan bahwa kepentingan kelompok rentan ini terintegrasi secara permanen dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.

## 2) Keseimbangan Manfaat (*Type of Benefits*)

Suatu program kebijakan sangat ditentukan oleh dimensi jenis manfaat, yakni keseimbangan antara distribusi manfaat material dan non-material yang diterima oleh kelompok sasaran. Temuan lapangan menunjukkan adanya asimetri capaian pada Program Sekolah Perempuan Srikandi. Luaran program saat ini didominasi secara masif oleh manfaat non-material, sementara pencapaian manfaat material masih berada pada fase inkubasi. Pada dimensi non-material, program ini membuahkan transformasi kognitif dan afektif yang sangat signifikan. Transformasi tersebut terwujud dalam bentuk peningkatan kesadaran akan hak-hak sipil, penguatan kepercayaan diri, serta keberanian untuk berpartisipasi di ruang publik.

Berdasarkan triangulasi data dari pengelola program dan pengalaman empiris partisipan, intervensi ini secara nyata berhasil meruntuhkan hambatan psikologis perempuan dalam mengakses layanan birokrasi desa. Partisipan yang sebelumnya terbelenggu oleh rasa kebingungan, dan keterasingan dari aktivitas sosial desa, kini mengalami transisi keagenan (*agency*). Partisipan telah memiliki literasi birokrasi yang memadai untuk mengetahui alur pelayanan yang tepat, berani menyuarakan kebutuhan, dan mampu mengakses bantuan secara mandiri tanpa perasaan ketakutan struktural. Meskipun pencapaian non-material tersebut merupakan wujud progresif dalam mereduksi ketidaksetaraan gender secara sosial, implementasi program ini masih menemui hambatan pada dimensi pemberdayaan material. Upaya peningkatan kapasitas ekonomi yang diinisiasi seperti pengelolaan kantin sekolah dan pelatihan keterampilan skala mikro diakui oleh pihak fasilitator belum mampu menyentuh akar struktural untuk mengikis ketergantungan ekonomi perempuan terhadap institusi keluarga.

Analisis terhadap distribusi manfaat ini menegaskan bahwa Program Sekolah Perempuan Srikandi telah sangat efektif dalam mendistribusikan kapital sosial dan kultural seperti perubahan *mindset*, keberanian, dan literasi hak bagi pemberdayaan awal. Namun, agenda keberlanjutan program mutlak menuntut peningkatan manfaat material. Skala intervensi ekonomi yang masih terbatas mengindikasikan bahwa perwujudan otonomi finansial perempuan di Desa Dauh Puri Kaja masih membutuhkan restrukturisasi kebijakan yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan berdampak lebih luas.

## 3) Derajat Perubahan yang Diharapkan (*Extent of Change Envisioned*)

Indikator *extent of change envisioned* dalam model implementasi kebijakan mengukur tingkat komprehensivitas transformasi pada sebuah program terhadap kelompok sasarannya. Temuan lapangan mengonfirmasi bahwa Program Sekolah Perempuan Srikandi telah memantik perubahan positif secara individual. Pergeseran afektif dan perilaku partisipan bermanifestasi pada peningkatan keberanian berpendapat, keterlibatan aktif dalam forum desa, serta inisiasi aktivitas ekonomi produktif skala mikro yang turut berkontribusi pada pendapatan rumah tangga. Triangulasi data dari pihak pengelola program menegaskan bahwa transisi dari sikap pasif menuju keagenan aktif ini berhasil membongkar hambatan psikologis awal. Partisipan yang pada fase awal implementasi diliputi ketakutan untuk bersuara, secara perlahan bertransformasi menjadi individu yang berani menyampaikan argumentasi dan berpartisipasi dalam diskursus publik.

Secara konseptual, perubahan yang dikonstruksi oleh inisiator program sesungguhnya dirancang untuk melampaui batas keberanian dalam berpendapat. Target ideal dari intervensi afirmatif ini adalah transisi menuju perubahan fundamental yang berkelanjutan, di mana partisipan tidak hanya diposisikan sebagai objek pasif penerima manfaat, melainkan bertransformasi menjadi subjek penggerak. Harapan institusional dari fasilitator menghendaki terjadinya dekonstruksi cara berpikir dan bertindak secara

permanen, yang ditandai dengan kemampuan partisipan untuk menjadi katalisator yang mereplikasi pengetahuan kepada perempuan lain di luar program. Temuan lapangan mengindikasikan mulai munculnya kesadaran kolektif melalui praktik edukasi sebaya (*peer education*) yang diinisiasi oleh partisipan di lingkungannya masing-masing.

Hasil temuan penelitian menunjukkan derajat perubahan riil yang terwujud saat ini masih berpusat pada ruang lingkup personal dan internal program. Evaluasi kritis terhadap luaran kebijakan menunjukkan belum adanya indikasi signifikan terkait ketimpangan relasi kuasa gender secara struktural. Pada ranah domestik, intervensi program belum menyentuh ranah negosiasi pembagian peran kerumahtanggaan maupun pembagian otoritas pengambilan keputusan di tingkat keluarga. Pada ranah publik, perubahan ini belum mampu mendorong peningkatan representasi perempuan dalam struktur inti pengambilan keputusan di pemerintahan desa. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa *extent of change envisioned* dari Program Sekolah Perempuan Srikandi baru berhasil membuahkan modifikasi perilaku individual dan keagenan awal, namun belum memiliki daya dalam konteks politik dan struktural yang memadai untuk meruntuhkan ketimpangan gender yang telah melembaga secara sistemik.

#### 4) Letak Pengambilan Keputusan (*Site of Decision Making*)

Dalam model implementasi kebijakan Grindle (1980), *site of decision making* menjadi indikator krusial yang mengukur sejauh mana desentralisasi dan partisipasi kelompok sasaran diakomodasi. Sentralisasi keputusan cenderung melahirkan kebijakan yang *top-down*, sementara desentralisasi membuka ruang deliberatif yang lebih inklusif. Temuan lapangan mengonfirmasi bahwa operasionalisasi Program Sekolah Perempuan Srikandi telah memfasilitasi pergeseran paradigma tersebut, bergerak menuju pola pengambilan keputusan yang lebih partisipatif dan dialogis di tingkat komunitas. Dari perspektif subjek sasaran, program ini berhasil mengkonstruksi ruang deliberatif di mana perempuan tidak lagi diposisikan sebagai objek pasif penerima kebijakan, melainkan dilibatkan secara aktif dalam merespons, menyetujui, dan mengevaluasi rancangan kegiatan. Pengalaman empiris partisipan menunjukkan bahwa pelibatan partisipan dalam penentuan teknis program seperti penyesuaian waktu dan jenis kegiatan serta tersedianya ruang untuk menyalurkan usulan, telah menumbuhkan perasaan dihargai yang menjadi fondasi penting bagi terbangunnya agensi perempuan.

Aspirasi yang terhimpun dari ruang kelas Sekolah Perempuan Srikandi tersebut tidak dibiarkan menguap, melainkan dikanalisasi melalui mekanisme mediasi kelembagaan. Koordinator program mengambil peran strategis sebagai representasi suara perempuan untuk diadvokasi ke arena politik formal desa, yakni Musyawarah Desa (Musdes). Keterlibatan pengelola Sekolah Perempuan Srikandi sebagai jembatan aspirasi akar rumput yang diakui validitasnya oleh aparat desa setempat. Secara institusional, pemerintah desa perlahan meninggalkan pola pengambilan keputusan sepihak terkait isu perempuan, dan beralih pada mekanisme koordinasi aktif dengan pengelola program yang dinilai lebih menguasai peta kebutuhan riil kelompok rentan di lapangan.

Mekanisme partisipatif ini menjadi sebuah upaya progresif dalam tata kelola desa, analisis kritis menemukan adanya asimetri otonomi. Keberadaan Program Sekolah Perempuan Srikandi bertransformasi menjadi wadah aspirasi perempuan, namun ruang tersebut masih bersifat termediasi. Hak prerogatif dan pengambilan keputusan strategis terutama yang menyangkut alokasi anggaran dan legalisasi kebijakan tetap tersentralisasi di tangan elite birokrasi pemerintahan desa. Dengan kata lain, transisi menuju otonomi partisipatif yang murni masih terbentur hambatan struktural. Transformasi relasi kuasa gender pada akhirnya masih sangat bergantung pada *political will* elite desa yang saat ini masih didominasi oleh struktur maskulin. Selama entitas perempuan belum menduduki kursi-kursi strategis pengambil keputusan secara langsung, partisipasi yang terbangun masih berada pada level representasi perwakilan, belum mencapai derajat kontrol absolut atas perumusan kebijakan.

#### 5) Kompetensi Pelaksana Program (*Program Implementers*)

Kompetensi, kapasitas, dan komitmen aktor pelaksana (*implementers*) merupakan indikator esensial yang menjembatani kebijakan secara teoretis dengan realitas di lapangan. Temuan empiris menunjukkan bahwa keunggulan komparatif Program Sekolah Perempuan Srikandi yang membedakannya dari inisiatif pemberdayaan konvensional terletak pada paradigma pendampingannya. Penerapan metode instruksional yang kaku, para fasilitator mengadopsi pendekatan andragogi yang empatik, dialogis, dan responsif terhadap dinamika sosio-psikologis di ruang kelas. Fleksibilitas metodologis ini menjadi instrumen dalam menciptakan ruang aman bagi kelompok sasaran. Kurikulum tidak diposisikan sebagai silabus absolut,

melainkan diadaptasi secara dinamis untuk merespons urgensi persoalan riil yang tengah dihadapi partisipan, seperti isu kerumahtanggaan, kekerasan, maupun kebutuhan dukungan sosial.

Implementasi dari kurikulum responsif secara efektif menjembatani perempuan rentan di Desa Dauh Puri Kaja. Kapasitas fasilitator dalam memandu diskursus yang sensitif berhasil membuahkan kohesi sosial dan tingkat kepercayaan di antara para partisipan. Hal ini terbukti dari terbangunnya jejaring sosial lintas dusun dan kesediaan partisipan untuk membagikan pengalaman hidup yang personal maupun traumatis. Profesionalisme pelaksana dalam menangani kasus-kasus secara berhati-hati dan konsisten mengonfirmasi bahwa program ini telah melampaui batas formalitas administratif birokrasi desa, dan secara nyata bertransformasi menjadi sistem dukungan sosial yang esensial. Akan tetapi, hasil analisis kritis terhadap operasionalisasi program menyingkap adanya hambatan yang membatasi optimalisasi kapasitas pelaksana. Tantangan utama berakar pada aspek frekuensi pertemuan dan manajemen waktu. Intensitas kegiatan yang hanya dijadwalkan satu kali dalam sebulan mengakibatkan proses internalisasi materi, pemantauan perubahan perilaku, serta tindak lanjut advokasi kasus berjalan sangat lambat. Ditinjau dari perspektif kelompok sasaran, minimnya frekuensi ini berbenturan dengan realitas beban ganda yang dipikul perempuan, khususnya partisipan usia lanjut. Keterlibatan aktif dalam ruang edukasi publik ini seringkali bergesekan dengan tanggung jawab domestik yang tidak mengalami penyusutan. Hal ini menyebabkan fasilitator belum mampu mengakselerasi pemberdayaan secara maksimal, akibat terbentur oleh keterbatasan waktu operasional dan struktur beban kerja domestik patriarki yang terjadi.

## 6) Ketersediaan Sumber Daya (*Resources Committed*)

Ketersediaan sumber daya merupakan prasyarat material dan operasional yang menentukan sejauh mana sebuah kebijakan dapat dieksekusi secara presisi di lapangan. Dimensi ini tidak hanya mencakup ketersediaan finansial, tetapi juga infrastruktur, kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta jejaring kelembagaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Program Sekolah Perempuan Srikandi ditopang oleh ekosistem kolaborasi lintas sektor yang solid, di mana beban penyediaan sumber daya didistribusikan secara proporsional. Sinergitas antara pemerintah desa dan *Non-Governmental Organization* (NGO) menciptakan sistem penopang yang komprehensif. Berdasarkan triangulasi data pengelola program, pembagian peran melalui dukungan pemerintah desa yang memfasilitasi legalitas, infrastruktur ruang, dan pendanaan operasional dasar, sementara Yayasan Bali Sruti menginjeksi kepakaran teknis dan kapasitas fasilitasi tingkat tinggi yang belum dimiliki oleh aparat desa.

Kolaborasi strategis yang terbentuk membuahkan luaran bagi ketahanan program, yakni keberlanjutan fiskal kelembagaan. Dari aspek pembiayaan, intervensi awal program yang semula ditopang oleh dana hibah eksternal secara bertahap berhasil diinkubasi dan dilembagakan ke dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Pelembagaan alokasi dana desa ini merupakan indikator krusial dari *political will* pemerintah lokal. Selain itu, operasionalisasi program juga telah terintegrasi dengan sistem rujukan penanganan kasus melalui perluasan jejaring lintas instansi formal, seperti pelibatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), dan Dinas Sosial. Meskipun fondasi sumber daya tersebut terbukti mumpuni dalam menjamin ketahanan program pada fase awal, hasil penelitian menunjukkan asimetri rasio antara keterbatasan jumlah fasilitator inti dan pendamping lapangan dengan luasnya proyeksi jangkauan serta kompleksitas persoalan kelompok rentan di Desa Dauh Puri Kaja. Dengan frekuensi pertemuan dan jumlah tenaga pendamping yang terbatas, penanganan kasus-kasus spesifik yang memerlukan advokasi dan intervensi mendalam berpotensi mengalami perlambatan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM secara kuantitatif dengan komitmen alokasi anggaran yang lebih progresif menjadi kebutuhan mutlak. Langkah ini dibutuhkan agar program tidak mengalami stagnasi, melainkan mampu mempercepat transformasi relasi gender secara holistik dan berkelanjutan.

## SUBSTANSI ATAU ISI KEBIJAKAN (*CONTENT OF POLICY*)

Keberhasilan sebuah kebijakan publik tidak hanya ditinjau secara desain konseptualnya (*Content of Policy*). Aktualisasi sebuah kebijakan diwarnai oleh ekologi politik, sosial, dan administratif di mana kebijakan tersebut dioperasionalkan, yang dikonseptualisasikan sebagai *Context of Implementation*. Dalam menganalisis pelaksanaan Program Sekolah Perempuan Srikandi (SPS) di Desa Dauh Puri Kaja, pembedahan terhadap *Context of Implementation* menjadi sangat krusial. Analisis pada bagian ini tidak lagi berfokus pada isi programnya, melainkan meninjau realitas di lapangannya. Melalui ketiga indikator konteks tersebut,

bagian ini akan menyingkap dinamika relasi kuasa antara aktor pendamping, elite desa, dan budaya patriarki lokal saling bernegosiasi dalam menentukan sejauh mana agenda kesetaraan gender ini dapat berakar dan bertahan di tingkat komunitas.

### 1) **Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi Aktor (*Power, Interest, and Strategies of Actors*)**

Aktualisasi sebuah kebijakan tidak terlaksana pada ruang hampa, melainkan terimplementasi di tengah konstelasi kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari berbagai aktor yang melingkupinya. Temuan lapangan memetakan relasi kuasa dalam implementasi Program Sekolah Perempuan Srikandi yang terdistribusi ke dalam empat entitas aktor utama: (1) Yayasan Bali Sruti sebagai pemegang kuasa keahlian; (2) Pemerintah Desa Dauh Puri Kaja sebagai representasi pemegang otoritas formal dan fiskal; (3) Koordinator Program yang mengemban kuasa operasional di tingkat partisipan; serta (4) institusi keluarga dan tokoh adat yang secara laten memegang kuasa normatif-kultural patriarki yang mensubordinasi ruang gerak perempuan.

Dalam operasionalisasinya, pengelola program menghindari penggunaan instrumen kekuasaan yang lebih mengedepankan strategi persuasif-dialogis dan berfokus dalam membangun kepercayaan. Pendekatan pra-kondisi yang humanis ini diimplementasikan melalui penjangkauan personal (*door-to-door*) untuk mendengarkan narasi kelompok rentan dan menciptakan rasa aman, yang dinilai efektif meruntuhkan resistensi awal sasaran. Di dalam ruang kelas, relasi kuasa didekonstruksi sedemikian rupa guna menciptakan ekosistem pembelajaran yang egaliter. Triangulasi data dari pengalaman partisipan mengonfirmasi bahwa fasilitator secara sadar meluruhkan dominasi otoritasnya, bertindak murni sebagai katalisator, dan memberikan ruang keagenan yang maksimal bagi peserta untuk memetakan serta memecahkan persoalannya sendiri tanpa adanya pemaksaan kehendak.

Temuan penelitian juga menunjukkan titik temu kepentingan antara Yayasan Bali Sruti, Pemerintah Desa, dan Koordinator Program terbukti solid secara internal dalam visi mereduksi ketimpangan gender, analisis kritis menyingkapi realitas yang asimetris pada tataran eksternal dan makro-kebijakan. Iklim anti-dominasi dan egaliter tersebut baru beroperasi di dalam ruang kelas program. Pada tatanan struktural desa, dominasi pengambilan keputusan strategis mutlak masih tersentralisasi pada hierarki aktor formal pemerintahan. Situasi ini berimplikasi pada terbatasnya daya politik partisipan yang belum memiliki kekuatan untuk mengeksekusi kebijakan secara mandiri. Oleh karena itu, tantangan strategis ke depan adalah bagaimana kuasa operasional dan keahlian yang telah terbangun di internal program Sekolah Perempuan Srikandi agar memiliki daya untuk mengintervensi dominasi otoritas birokrasi formal desa serta mendekonstruksi hegemoni kultural patriarki secara lebih substansial.

### 2) **Karakteristik Lembaga dan Rezim (*Institution and Regime Characteristics*)**

Dalam model implementasi kebijakan, indikator karakteristik lembaga dan rezim menduduki posisi penentu yang mengukur tingkat kondusivitas lingkungan politik dan administratif terhadap sebuah intervensi. Secara empiris, ekologi politik di Pemerintah Desa Dauh Puri Kaja menampilkan karakteristik kelembagaan yang sangat progresif, transparan, dan responsif terhadap isu gender, meskipun beroperasi di tengah kuatnya bayang-bayang budaya patriarki lokal. Komitmen institusional rezim desa ini tidak hanya berhenti pada retorika, melainkan termanifestasi secara konkret melalui pelebagaan kebijakan. *Political will* tersebut dibuktikan melalui penerbitan legitimasi yuridis berupa Surat Keputusan (SK) Perbekel, dukungan alokasi fiskal, penyediaan infrastruktur sarana, serta terbangunnya sistem komunikasi lintas sektoral yang inklusif.

Hasil triangulasi data dari aparat desa, koordinator program, dan lembaga pendamping (Yayasan Bali Sruti) mengonfirmasi bahwa kepemimpinan desa menunjukkan responsivitas birokrasi yang tinggi. Iklim birokrasi yang progresif ini mendekonstruksi stereotipe birokrasi tingkat akar rumput yang kerap berbelit-belit. Selain itu, dukungan desa diakui murni berlandaskan pada komitmen pemberdayaan yang substantif, terbebas dari bias kepentingan pragmatis. Walaupun *political will* dan inklusivitas administratif desa terbukti menjadi tulang punggung keberhasilan operasionalisasi program, analisis kritis menyingkapi adanya sebuah paradoks institusional. Sinergisitas lintas aktor yang berjalan mulus dan minim friksi ini dimungkinkan terjadi justru karena Program Sekolah Perempuan Srikandi masih dikerangkai dan diterima secara institusional sebatas sebagai kegiatan sosial-edukatif. Di balik kelenturan birokrasi tersebut, struktur kelembagaan desa pada hakikatnya masih bersifat hierarkis dan secara laten tetap dikendalikan oleh hegemoni budaya patriarki. Konsekuensinya, agenda kesetaraan gender sangat mudah diakomodasi selama masih berada pada wilayah peningkatan kapasitas individu secara kognitif. Namun, pergerakan menjadi jauh lebih lambat ketika tuntutan pemberdayaan tersebut mulai menyentuh ranah politis, yakni

upaya dekonstruksi struktur pengambilan keputusan formal dan pembagian kekuasaan (*power-sharing*) di tingkat desa.

### 3) Kepatuhan dan Daya Tanggap (*Compliance and Responsiveness*)

Dalam kerangka evaluatif model Grindle (1980), kepatuhan dan daya tanggap berfungsi sebagai instrumen pengukur utama terhadap tingkat penerimaan, relevansi, dan legitimasi sebuah kebijakan di mata kelompok sasaran. Dari perspektif institusional, Program Sekolah Perempuan Srikandi terbukti mendekonstruksi sikap apatis perempuan di tingkat akar rumput. Sebelum adanya intervensi kebijakan ini, ruang deliberatif desa sangat didominasi oleh bias maskulin yang mengeksklusi perempuan. Namun, pascaintervensi, daya tanggap perempuan terhadap isu publik mengalami perubahan yang signifikan, yang bermanifestasi pada keterlibatan aktif dalam forum-forum strategis desa, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Triangulasi data dari elite birokrasi desa mengonfirmasi pergeseran paradigma ini, di mana tingkat partisipasi perempuan yang sebelumnya sangat rendah kini bertransformasi menjadi responsif yang aktif dalam memberikan masukan terhadap kebijakan desa.

Konsistensi daya tanggap tersebut merepresentasikan sebuah capaian metodologis yang esensial. Berbeda dengan tren umum pada diskursus program pemberdayaan komunitas di mana tingkat partisipasi kerap mengalami lonjakan semu di fase awal lalu berujung pada penurunan. Program SPS justru menampilkan grafik partisipasi yang terus menanjak dan stabil. Indikator daya tanggap ini tervalidasi secara kuat melalui keberanian partisipan dalam mengakses mekanisme pelaporan formal, seperti peningkatan pengaduan ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2KPA), yang menandakan terbangunnya kepercayaan institusional. Tingkat kepatuhan partisipan bukan direproduksi dari paksaan struktural atau kewajiban administratif, melainkan bersumber dari kepatuhan intrinsik. Pendekatan andragogi yang mengubah pandangan awal dan rasa tidak aman partisipan menjadi kedisiplinan serta rasa memiliki yang mendalam terhadap program. Meskipun indikator kepatuhan dan daya tanggap merefleksikan keberhasilan pelaksanaan program, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberlanjutan responsivitas aktif ini bertumpu pada struktur yang rapuh. Eksistensinya masih sangat bergantung pada stabilitas komitmen elite desa dan intensitas pendampingan eksternal dari *Non-Governmental Organization* (NGO). Penelitian ini juga menunjukkan bahwa selama sosial-budaya setempat tidak diintervensi secara struktural, kedisiplinan dan partisipasi aktif peserta di ruang publik akan terus berbenturan dengan realitas beban ganda di ranah domestik. Oleh karena itu, upaya untuk mentransformasi daya tanggap afektif ini menjadi budaya politik komunal yang permanen mensyaratkan adanya intervensi kebijakan lanjutan. Kebijakan diperlukan untuk mendekonstruksi pembagian peran berbasis gender guna meringankan beban reproduksi sosial perempuan di tingkat rumah tangga.

## KESIMPULAN

Implementasi Program Sekolah Perempuan Srikandi di Desa Dauh Puri Kaja membuktikan bahwa intervensi kebijakan afirmatif ini mampu memicu dekonstruksi awal terhadap ketimpangan gender. Melalui kolaborasi strategis antara Yayasan Bali Sruti dan Pemerintah Desa yang ditopang oleh *political will* yang progresif yang tercermin dari pelembagaan program mampu mendobrak budaya diam yang selama ini membelenggu kelompok perempuan rentan. Pendekatan andragogi yang empatik dan dialogis menunjukkan transformasi ruang edukasi menjadi ruang aman yang pada gilirannya menumbuhkan kepatuhan intrinsik dan partisipasi aktif perempuan di ruang desa. Walaupun berhasil mentransformasikan kognitif dan afektif partisipan, namun pemberdayaan yang berlangsung masih dihadapkan oleh paradoks struktural. Kepercayaan diri, literasi hak, keberanian bersuara partisipan belum diimbangi dengan capaian pada dimensi kapital material, di mana kondisi ini belum melepaskan partisipan dari ketergantungan finansial. Aspirasi perempuan diakomodasi dengan baik, namun pengambilan keputusan strategis tetap tersentralisasi di tangan elite formal desa. Ekosistem kesetaraan ini juga masih rentan terbentur oleh realitas beban ganda akibat belum terdekonstruksinya hegemoni kultural patriarki di ranah domestik. Sebagai sebuah model solutif dalam menghadapi ketimpangan gender, studi ini menyimpulkan bahwa Program Sekolah Perempuan Srikandi menjadi inkubator keagenan sosial yang sangat efektif, namun membutuhkan intervensi lanjutan untuk mencapai transformasi struktural. Skalabilitas program perlu ditingkatkan melalui intervensi pemberdayaan ekonomi dan pembagian kekuasaan politik secara langsung. Hanya melalui pengintegrasian otonomi material

dan desentralisasi ruang pengambilan keputusan, eforia kesadaran individu dapat bertransformasi menjadi kesetaraan gender yang berkeadilan secara permanen di tingkat komunitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adnawi, I., & Darmawan, D. (2024). Pelaksanaan Program Sekolah Perempuan Meraih Impian dan Cita-Cita (Sekoper Cinta) Di Kota Bekasi. *Eastasouth Journal of Positive Community Services*, 2, 93–101. <https://doi.org/10.58812/ejpcs.v2i02>
- Badan Pusat Statistik. (2024). Indeks Ketimpangan Gender 2023 (Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik, Ed.; Vol. 2). Badan Pusat Statistik.
- Chen, H., & Volpe, R. P. (2002). Gender Differences in Personal Financial Literacy Among College Students. *Financial Services Review*, 11, 289–307. <https://doi.org/10.61190/fsr.v11i3.4739>
- Githaiga, G., & Wildermuth, N. (2022). Radio, mobile communications, and women's empowerment: Experiences in Mathare, Nairobi. *The African Journal of Information and Communication (AJIC)*, (30). <https://doi.org/10.23962/ajic.i30.13753>
- Gudjonsson, S., Minelgaite, I., Kristinsson, K., & Pálsdóttir, S. (2022). Financial Literacy and Gender Differences: Women Choose People While Men Choose Things? *Administrative Sciences*, 12(4). <https://doi.org/10.3390/admsci12040179>
- Iqbal Hibatulloh, F., & Nur Haryani, T. (2023). Analisis Gender Longwe pada Program Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri di Desa Sumber Sari Kabupaten Sleman. *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.20961/wp.v3i1.75887>
- Kabeer, N. (1999). Resources, Agency, Achievements: Reactions on the Measurement of Women's Empowerment. 30, 435–464. <https://doi.org/10.1111/1467-7660.00125>
- Komnas Perempuan. (2024). Menata Data Menajamkan Arah: Refleksi Pendokumentasi Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan.
- Kurniawan, B. A., & Ana Melati, N. F. (2022). Pemberdayaan Perempuan Melalui Sekolah Perempuan Di Kabupaten Gresik. *Journal Of Gender Equality And Social Inclusion (Gesi)*, 1(1).
- Latifa Rahmasari, S., Fitriani, D. A., & Farihat, K. S. (2023). Peran Pendidikan Non-Formal Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan Di Desa Kanyoran. <https://repository.um.ac.id/4606/>
- Made Alit Septiari, D., & Gusti Ayu Widya Dhammayanti, I. (2023). Eksistensi Perempuan Bali Dalam Budaya Patriarki. *Jurnal Hasil Penelitian*, 3(1), 129. <https://doi.org/10.55115/jp.v3i2.3775>
- Mubarak, S., Zauhar, S., Setyowati, E., & Suryadi. (2020). Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward III, Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework. *Journal of Public Administration Studies*, 5 No 1(1), 33–38. <https://doi.org/10.21776/ub.jpas.2020.005.01.7>
- Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak (2023). <https://jdih.denpasarkota.go.id/produk-hukum/peraturan-perundang-undangan/peraturan-walikota-denpasar/peraturan-walikota-nomor-22-tahun-2023-tentang-desa-ramah-perempuan-dan-peduli-anak/>
- Putra, I Putu Adi Permana. 2023. "Perempuan Dalam Pariwisata : Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Pada Pengelolaan Objek Wisata Tukad Bindu Di Kota Denpasar." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 9(1): 81–91. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIIS/article/view/58445>.
- Putra, I Putu Adi Permana. 2025. "Pembangunan Desa Berbasis Gender : Analisis Model Desa Ramah Perempuan Dan Peduli Anak ( DRPPA ) Sebagai Instrumen Pembangunan Berkeadilan Di Kota Denpasar Berbagai Permasalahan Mengenai Gender Dan Anak Masih Terjadi Di Kota Denpasar . Kekerasan Pada Anak." *Jurnal Good Governance* 21(1): 189–202. <https://jurnal.stialan.ac.id/index.php/gg/article/view/945>.
- Ramadhani, A. D., & Yuliani, S. (2022). Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Keluarga Harapan di Kabupaten Klaten (Studi Gender Model Sara Hlupekile Longwe). *Jurnal Mahasiswa Wacana Publik*, 2(2), 390–408. <https://doi.org/10.20961/wp.v2i2.66548>
- Septianingrum, G. A., Alvito Rizqi Fatihah, P., Aldavia Mumtaz, C., Miftakhul Jannah, A., Arya Duta, R., & Istiqomah, N. (2024). Pemberdayaan Perempuan Melalui Sekolah Perempuan Karangturi (SEANTURI) untuk Meningkatkan Kualitas Diri dan Keluarga di Karangturi, Karanganyar. *Jurnal Pengetahuan, Teknologi Dan Seni Bagi Masyarakat*, 13 No 2, 183–195. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/semar.v13i2.80732>
- Simfoni - PPA. (2025). Data Perbandingan Jumlah Kasus Kekerasan Di Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. <https://kekerasan.kemennppa.go.id/>

- Sugiyono, P. (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Dr.Ir.Sutopo.S, Ed.; 2nd ed.). ALFABETA, cv. [www.cvalfabeta.com](http://www.cvalfabeta.com)
- Undang - Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (2004). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004>
- Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>